

KAJIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH PERBATASAN

Iskandar Agung
e-mail: rusnah_syarif@yahoo.co.id
Puslitjak Balitbang Kemdikbud

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan, dan (2) kondisi Wawasan Kebangsaan peserta didik/siswa di daerah perbatasan. Yang pertama bermaksud mendeskripsikan kondisi penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari aspek masukan siswa, sarana-prasarana, ketenagaan, biaya pendidikan, kurikulum, dan hasil belajar, serta berupaya menganalisis faktor pengaruh dari 5 (lima) aspek di antaranya terhadap hasil belajar peserta didik/siswa di daerah perbatasan. Yang kedua bermaksud mendeskripsikan kondisi wawasan kebangsaan, kemudian mengemukakan alternatif pemikiran terkait dengan upaya penanaman dan pembentukan wawasan kebangsaan peserta didik/siswa di daerah perbatasan. Dari hasil penelitian ini beberapa saran dikemukakan, yakni: diperlukan upaya untuk meningkatkan segenap aspek pendidikan di daerah perbatasan, yakni terkait dengan pembangunan gedung sekolah, penyediaan fasilitas belajar, pemenuhan buku pelajaran, meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru, sampai dengan membangun (baca: menyediakan) tempat tinggal (mess/rumah dinas) untuk tenaga pendidik dan nonpendidik. Khusus pembentukan wawasan kebangsaan peserta didik/siswa, diperlukan penyebaran dan perluasan pendidikan wawasan kebangsaan yang lebih intensif melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler, disertai dengan perlunya melakukan revitalisasi peraturan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas agar dapat berperan sebagai agen atau mediator pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Kata kunci: daerah perbatasan, pembangunan pendidikan, wawasan kebangsaan, intrakurikuler, ekstrakurikuler.

STUDY ON EDUCATION PRACTICE IN THE BORDERLAND

Abstract: *This study aimed to determine: (1) the condition of education practice, and (2) the condition of Nationality Insights of learners / students in the border area. The first aim is intended to describe the condition of education in the border area which is consists of the aspects of student input, infrastructure, human resource, education financing, curriculum, and learning outcomes. The study also attempts to analyze the effect of 5 aspects including students learning outcomes. The second one is intended to describe the condition of nationalism insight, then propose alternative ideas related to the effort of instilling and establishing the concept of nationalism to learners / students in the border area. The study obtained that the conditions of education and the nationalism insight of learners / students classified as inadequate, low, or poor. On that basis, there are some suggestions for improvement, namely: it is required to improve all aspects of education in the border area, related to the construction of school buildings, provision of learning facilities, fulfillment of textbooks, teachers' abilities and skills, to build a residence (mess / home office) for educators and non-educator staff. Specifically in the establishment of nationalism insight of learners / students, it is required a deployment and expansion of the concept of nationalism education more intensively through intra-and extracurricular activities, along with the need to increase the role of local government, school principals, teachers, and supervisor as an agent or mediator of Nationality Insights.*

Keywords: Border area, nation character, intracurricular, extracurricular.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan letak geografis, wilayah darat Republik Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yaitu Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Palau

dan Timor Leste. Kenyataannyadaerah perbatasan ini masih minim perhatian, padahal letaknya teramat strategis sebagai wilayah terdepan guna mencegah dan menangkal segenap gangguan, rongrongan, dan ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara.

Tegasnya perbatasan negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Oleh karenanya pembangunan daerah perbatasan selayaknya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Namun, nyatanya daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara serius dan proporsional. Dari sisi pengamanan, daerah perbatasan masih minim sarana-prasarana dan aparat keamanan, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai persoalan seperti perubahan batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan transnasional (*transnational crimes*). Di samping itu, daerah perbatasan di Indonesia umumnya masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Beberapa daerah perbatasan terkesan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan, sehingga masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga.

Situasi paradoks antara harapan dan kenyataan yang diperlihatkan dari peran dan fungsi daerah perbatasan, perlu mulai segera dibenahi. Salah satunya di sektor pendidikan, perlu didukung oleh aspek-aspek pendidikan yang memadai, mulai dari sarana-prasarana, fasilitas belajar, ketenagaan, kelengkapan buku pelajaran, dan sebagainya. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan pun amat terkait dengan perlunya mengembangkan dan membentuk wawasan, sikap, dan perilaku kebangsaan peserta didik/siswa. Berbagai fenomena mengindikasikan masih rendahnya kesadaran dan sikap Wawasan Kebangsaan itu.

Oleh karena itu, optimalisasi penyelenggaraan pendidikan daerah perbatasan merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji serius, mendalam, dan cermat. Tidak berlebihan jika Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang-Kemendikbud dalam tahun 2012 mengarahkan salah satu kajiannya terhadap terhadap persoalan pendidikan di daerah perbatasan. Melalui kajian diharapkan dapat dihasilkan suatu pemikiran konseptual dan operasional terhadap pembangunan bidang pendidikan guna membentuk dan mengembangkan sumberdaya manusia yang bermutu tinggi di daerah perbatasan, baik dari segi penguasaan dan kemampuan iptek, daya saing, dan pembentukan karakter, rasa, dan sikap kebangsaan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mencari alternatif penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan dalam upaya membangun dan membentuk sumberdaya manusia yang menguasai iptek, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan yang tinggi. Se-

cara rinci, penelitian bertujuan: (1) mengetahui kondisi penyelenggaraan pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (2) mengetahui kondisi dan upaya mengembangkan cara atau strategi pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi peserta didik/siswa di daerah perbatasan; dan (3) memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan.

Kajian Teori

Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sangat terbatas. Di masa lalu kawasan perbatasan dipandang sebagai wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak. Akibatnya, di sejumlah daerah, kawasan perbatasan tidak tersentuh dinamika pembangunan terutama di bidang pendidikan. Masyarakat di kawasan itu pun umumnya miskin dan lebih berorientasi ke negara tetangga. Di lain pihak, negara tetangga seperti Malaysia justru telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Sejak tahun 1999, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal yang harus mendapat prioritas pembangunan. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (*security approach*). Di samping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.

Dalam Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Perbatasan diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Selain itu,

kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan lebih selektif dan optimal.

Sejauh ini pengelolaan perbatasan antarnegara masih bersifat sementara (*ad hoc*) dengan leading sektor dari berbagai instansi terkait. Pada saat ini, lembaga-lembaga yang menangani masalah perbatasan antar negara tetangga adalah: 1) General Border Committee RI-PNG diketuai oleh Panglima TNI; 2) Joint Border Committee RI-PNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri; 3) Joint Border Committee RI-UNTAET (Timtim) diketuai oleh Dirjen Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri; dan 4) Joint Commisison Meeting RI – Malaysia (JCM) diketuai oleh Departemen Luar Negeri yang sifatnya kerjasama bilateral.

Atas dasar itu dalam penanganan masalah perbatasan diperlukan adanya program yang terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dengan memperhatikan segenap aspek yang mempengaruhi seperti kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, keamanan, konservasi sumber daya alam, dan sumberdaya manusia. Dalam pergeseran pendekatan dari keamanan ke kesejahteraan, jelas sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumberdaya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Dalam kaitan ini pendidikan memiliki peran penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan, sekaligus wahana untuk membentuk karakter dan sikap kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air yang tinggi.

Daerah perbatasan memerlukan sentuhan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu meningkatkan kualitas SDM-nya. Melalui peningkatan kualitas SDM ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah perbatasan yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan yang tinggi. Atas dasar itu untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan yang bermutu, jelas diperlukan perhatian dan analisisnya terhadap segenap sub-sistem atau komponen pendidikan yang ada, di antaranya masukan siswa, sarana-prasarana, ketenagaan, biaya pendidikan, kurikulum, dan hasil belajar. Perlu diketahui bagaimana kondisi dari komponen-komponen tersebut, kemudian dianalisis sejauhmana pengaruh komponen tersebut terhadap hasil belajar siswa.

Hal lain yang perlu diketahui adalah pembentukan kesadaran, sikap, dan perilaku kebangsaan yang tinggi. Hal itu diakibatkan kerentanan manusia yang hidup di daerah perbatasan terhadap pengaruh eksternal, terutama nilai-nilai yang didukung oleh negara lain. Persoalan ini bertambah kompleks jika dihadapkan pada pengaruh kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan yang amat bertumpu dari negara tetangga. Penanaman nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang kuat pada peserta didik, niscaya akan berfungsi sebagai filterisasi untuk menangkal segenap pengaruh unsur luar tersebut.

Oleh karena itu perlu diketahui pula kondisi dan situasi wawasan kebangsaan peserta didik/siswa daerah perbatasan, kemudian berusaha mencari dan menemukan suatu bentuk pemikiran mengenai penyebaran dan penanaman nilai, sikap, dan perilaku kebangsaan terhadap peserta didik. Upaya penyebaran dan penanaman wawasan kebangsaan perlu didesain secara cermat dan matang, sehingga terlebih dahulu perlu diidentifikasi unsur nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan, serta alternatif penyebaran dan penanaman yang perlu dijalankan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan, dan (2) kondisi Wawasan Kebangsaan peserta didik/siswa di daerah perbatasan

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di 11 lokasi daerah perbatasan, yaitu: Kabupaten Natuna dan Enambas

– Provinsi Kepulauan Riau; Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu – Provinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Nunukan dan Malinau – Provinsi Kalimantan Timur; Kabupaten Atambua/Belu – Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kepulauan Talaud – Provinsi Sulawesi Utara; dan Kabupaten Kroom – Provinsi Irian Jaya.

Penelitian ini dilaksanakan selama satu tahun, yaitu dimulai pada bulan Januari hingga Desember 2012.

Prosedur Penelitian

a. Sumber Data

Sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah peserta didik/siswa yang duduk di jenjang pendidikan SMP dan SMA di daerah perbatasan sebanyak 540 orang siswa yang terdiri dari 265 orang siswa SMP dan 275 orang siswa SMA.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, responden diminta menjawab butir pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan dan telah mengalami uji validitas dan reliabilitas.

Teknik Analisis Data

Model analisis yang dikembangkan di sini tercakup ke dalam kategori *Correlated-Multivariate* Model yang dicirikan memiliki 5 (lima) variabel eksogen, yakni: Masukan Siswa (MS), Sarana-Prasarana (SP), Ketenagaan (KN), Biaya Pendidikan (BP), Kurikulum (KR), serta satu variabel endogen Hasil Belajar (HB).

Persamaan Struktur:

$$HB = \gamma_1AP + \gamma_2SP + \gamma_3KN + \gamma_4BP + \gamma_5KR + \zeta_1$$

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Konsep Teoritis	Definisi Operasional	Skala Pengukuran
Masukan Siswa (MS)	Indikator: X1 = Aspirasi pendidikan X2 = Latarbelakang sosek X3 = Perhatian orangtua X4 = Karakteristik geografis X5 = Bekerja mencari nafkah	Skala Likert: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Ragu-ragu (R) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS)
Sarana-Prasarana (SP)	X6 = Bangunan sekolah X7 = Ruang kelas X8 = Fasilitas belajar X9 = Perpustakaan sekolah X10 = Ruang kantor	Skala Likert: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Ragu-ragu (R) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS)
Ketenagaan (KN)	X11 = Kelengkapan jumlah X12 = Dedikasi ketenagaan X13 = Tingkat kesejahteraan X14 = Penyediaan fasilitas	Skala Likert: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Ragu-ragu (R) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS)
Biaya Pendidikan (BP)	X15 = Besaran biaya pendidikan X16 = Tanggungan pemerintah X17 = Sumber keluarga X18 = Tawaran negara tetangga	Skala Likert: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Ragu-ragu (R) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS)

Konsep Teoritis	Definisi Operasional	Skala Pengukuran
Kurikulum (KR)	X19 = Pengembangan KTSP X20 = Pemanfaatan buku paket X21 = Peningkatan profesi X22 = Keaktifan KKG/MGMP X23 = Sumber pengayaan	Skala Likert: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Ragu-ragu (R) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS)
Hasil Belajar (HB)	Y1 = Tingkat kelulusan Y2 = Tingkat melanjutkan Y3 = Pencapaian Hasil UN Y4 = Modal mencari pekerjaan di negeri tetangga	Skala Likert: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Ragu-ragu (R) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS)

Tabel 2: Model Pengukuran dan Model Struktural Hubungan yang Terbentuk

Model Pengukuran Konstruk	Indikator	Persamaan Pengukuran
Masukan Siswa (MS)	X1	$X_1 = \lambda_1 \text{Aspirasi} + \delta_1$
	X2	$X_2 = \lambda_2 \text{Sosialekonomi} + \delta_2$
	X3	$X_3 = \lambda_3 \text{Perhatianortu} + \delta_3$
	X4	$X_4 = \lambda_4 \text{Geografis} + \delta_4$
	X5	$X_5 = \lambda_5 \text{Bekerja} + \delta_5$
Sarana-Prasarana (SP)	X6	$X_6 = \lambda_5 \text{Bangunan} + \delta_6$
	X7	$X_7 = \lambda_7 \text{Kelas} + \delta_7$
	X8	$X_8 = \lambda_8 \text{Fasilitas} + \delta_8$
	X9	$X_9 = \lambda_9 \text{Perpustakaan} + \delta_9$
	X10	$X_{10} = \lambda_{10} \text{Kantor} + \delta_{10}$
Ketenagaan (KN)	X11	$X_{11} = \lambda_{11} \text{Kelengkapan} + \delta_{11}$
	X12	$X_{12} = \lambda_{12} \text{Dedikasi} + \delta_{12}$
	X13	$X_{13} = \lambda_{13} \text{Kesejahteraan} + \delta_{13}$
	X14	$X_{14} = \lambda_{14} \text{Fasilitas} + \delta_{14}$
Biaya Pendidikan (BP)	X15	$X_{15} = \lambda_{15} \text{Besaran} + \delta_{15}$
	X16	$X_{16} = \lambda_{16} \text{Tanggungan} + \delta_{16}$
	X17	$X_{17} = \lambda_{17} \text{Sumberkeluarga} + \delta_{17}$
	X18	$X_{18} = \lambda_{18} \text{Tawaran} + \delta_{18}$
Kurikulum (KR)	X19	$X_{19} = \lambda_{19} \text{Pengembangan} + \delta_{19}$
	X20	$X_{20} = \lambda_{20} \text{Pemanfaatan} + \delta_{20}$
	X21	$X_{21} = \lambda_{21} \text{Profesi} + \delta_{21}$
	X22	$X_{22} = \lambda_{22} \text{Keaktifan} + \delta_{22}$
	X23	$X_{23} = \lambda_{23} \text{Pengayaan} + \delta_{23}$
Hasil Belajar (HB)	Y1	$Y_1 = \lambda_{24} \text{Lulusan} + \epsilon_1$
	Y2	$Y_2 = \lambda_{25} \text{Melanjutkan} + \epsilon_2$
	Y3	$Y_3 = \lambda_{26} \text{UN} + \epsilon_3$
	Y4	$Y_4 = \lambda_{27} \text{Modalkerja} + \epsilon_4$

HASIL PENELITIAN

Kondisi dan Faktor Pengaruh Penyelenggaraan Pendidikan

Paling sedikit ada 6 (enam) variabel laten yang

digunakan untuk mengetahui persepsi peserta didik/siswa terhadap kondisi pendidikan di daerahnya, antara lain: Masukan Siswa (MS), Sarana-prasarana

(SP), Ketenagaan (pendidik dan nonpendidik), biaya pendidikan, kurikulum, dan hasil belajar. Dari penelitian ini dihasilkan rerata persepsi responden terhadap kondisi pendidikan di daerah perbatasan di sekitarnya.

Tabel 3. Persepsi Responden terhadap Kondisi Pendidikan di Daerah Perbatasan

No	Kab.	Kondisi Pendidikan (Rata-rata)						Total
		MS	SP	KN	BP	KR	HB	
1	Natuna, Kep. Riau	2.92	2.6	2.5	2.84	2.68	2.69	2,71
2	Enam-bas, Kep. Riau	2.79	2.34	2.55	2.85	2.98	2.95	2,71
3	Sambas, Prov. Kalbar	2.91	2.35	2.38	2.46	2.76	2.67	2,59
4	Sintang, Prov. Kalbar	2.89	2.47	2.72	2.99	2.72	2.94	2,78
5	Bengkayang, Prov. Kalbar	2.77	2.65	2.73	2.95	2.68	2.92	2,78
6	Kapuas Hulu, Prov. Kalbar	2.92	2.48	2.78	2.95	2.56	2.88	2.81
7	Nunukan, Prov. Kaltim	2.87	2.48	2.54	2.37	2.57	2.55	2.58
8	Malinau, Prov. Kaltim	2.96	2.74	3,50	3.10	2.46	2.81	2.84
9	Atambua, Prov. NTT	2.63	2.58	2.54	2.84	2.46	2.48	2,59
10	Sangihe, Kep. Talaud	2.89	2.74	2.64	2.88	2.89	2.83	2.8
11	Kroom, Prov. Papua	2.54	2.68	2.86	2.78	2.57	2.59	2.63
Jumlah		2,83	2,55	2,60	2.82	2.69	2,76	2.73

Dalam tabel 3 diperlihatkan, bahwa terdapat variasi kondisi pendidikan di daerah perbatasan yang diteliti. Dalam setiap dan keseluruhan aspek pendidikan yang dikaji, responden mempersepsikan dalam kategori sedang/cukup. Namun dari hasil pengamatan lapangan diperoleh, bahwa kondisi pendidikan di daerah perbatasan sebenarnya amat memperhatikan dengan dihadapi oleh keterbatasan-keterbatasan yang ada, baik dari segi fisik maupun nonfisik, manusiawi maupun nonmanusiawi. Kondisi ini amat ketinggalan jauh jika dibanding dengan daerah lainnya di Indonesia. Bahkan apabila dibandingkan dengan di

negara tetangga, kondisi dan situasi pendidikan yang memperhatikan dan menyedihkan itu amat terasa. Gedung sekolah setingkat SMP dan SMA jauh lebih jelek dibanding dengan gedung sekolah di negara tetangga setingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Rasanya perhatian dan perlakuan yang lebih serius perlu ditunjukkan oleh pihak yang berkompeten, apabila ingin meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antar variabel latent eksogen dengan variabel latent endogen dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan. Variabel laten adalah konsep abstrak yang menjadi perhatian yang hanya dapat diamati secara tidak langsung melalui efeknya pada variabel indikator yang teramati (Kusnendi, 2008). Variabel indikator adalah variabel yang dapat diamati atau diukur secara empiris. Sebelum dilakukan analisis hubungan pengaruh, perlu diketahui apakah model yang diusulkan dalam diagram jalur (model teoritis) sesuai atau cocok (*fit*) dengan data. Evaluasi terhadap kinerja model dilakukan secara menyeluruh (*overall test*). Hubungan struktural yang diuji pada penelitian ini mengasumsikan bahwa variabel Masukan Siswa (KSI1), Sarana-Prasarana Pendidikan (KSI2), Ketenagaan (KSI3), Biaya Pendidikan (KSI4), dan Kurikulum (KSI5) sebagai variabel latent eksogen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Hasil Belajar (ETA1) sebagai variabel latent endogen. Lebih jelasnya hubungan struktural tersebut menunjukkan bahwa model hubungan struktural dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hipotesis utama yaitu: terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel latent eksogen dengan variabel latent endogen.

Hasil analisis terhadap model persamaan structural pada model menghasilkan nilai *Degree of Freedom* (DF) = 309; Chi-square (χ^2) = 1258,19; P-value = 0,00000; Root Mean Square Residual Error of Approximation (RMSEA) = 0,075. Sebuah model bisa dikatakan fit atau terdapat kesesuaian antara model teoritik dengan data yang dikumpulkan, jika nilai-nilai yang didapat dari masing-masing perhitungan uji kesesuaian model memenuhi nilai standar GOF.

Dari Hasil Uji Kecocokan dapat disimpulkan, bahwa model yang diajukan dalam penelitian ini adalah baik karena mencapai target/tingkat kecocokan (baik) yang diharapkan. Hasil output ukuran kecocokan model ditampilkan dalam tabel 4 di samping.

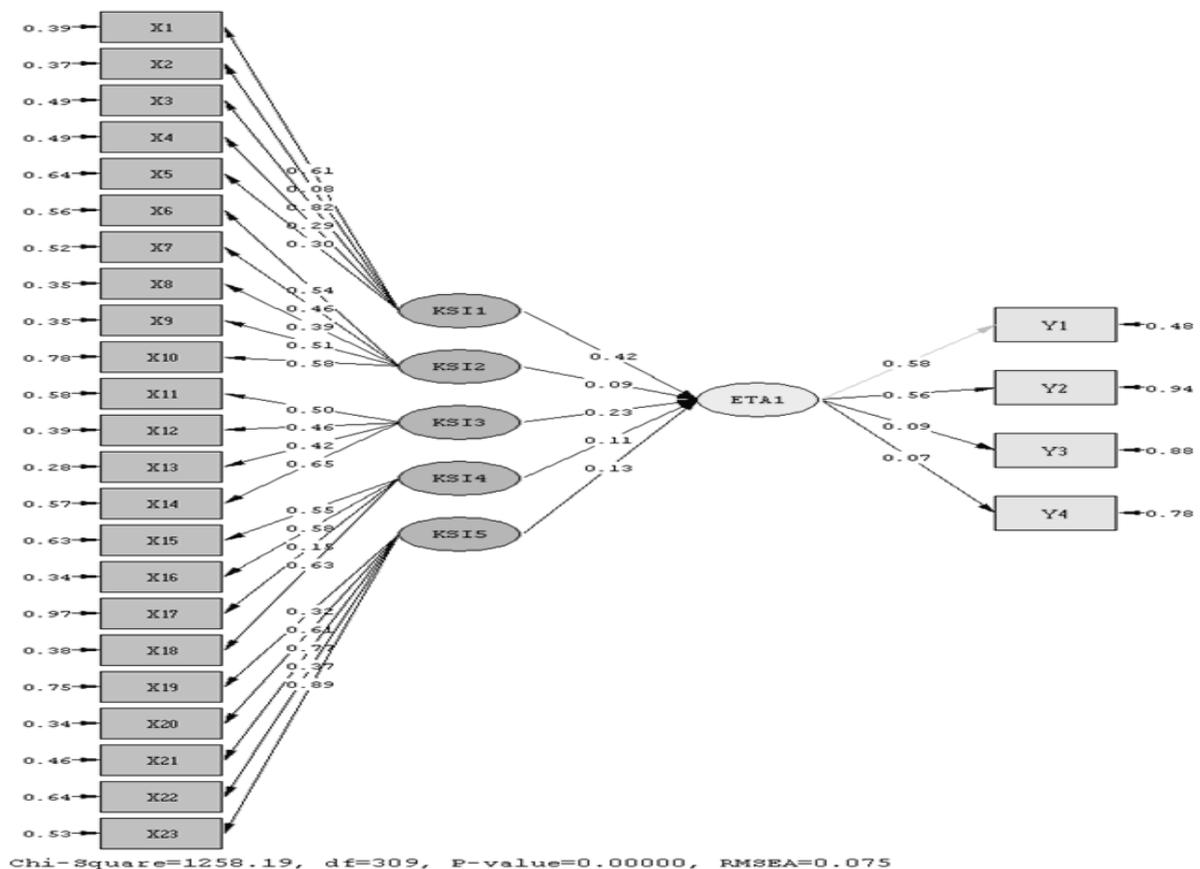
M = *Mode*

S = *Saturated*

I = *Independence*

Tabel 4: Hasil Uji Kecocokan Keseluruhan Model

Ukuran GOF	Target-Tingkat Kecocokan	Hasil Estimasi	Tingkat Kecocokan
Chi-Square P	Nilai yang kecil $p < 0.05$	$\chi^2 = 1119.41$ ($p = 0.00$)	Baik (Good Fit)
NCP Interval	Nilai yang kecil Interval yg sempit	949.14 (843.63 ; 1062.29)	Baik (Good Fit)
RMSEA P (close fit)	$RMSEA \leq 0.08$ $p < 0.05$	0.075 $p = 0.00$	Baik (Good Fit)
ECVI	Nilai yang kecil dan dekat dengan ECVI saturated	$M^* = 2.59$ $S^* = 1.40$ $I^* = 10.48$	Baik (Good Fit)
AIC	Nilai yang kecil dan dekat dengan AIC saturated	$M^* = 1396.19$ $S^* = 756.00$ $I^* = 5432.85$	Baik (Good Fit)
CAIC	Nilai yang kecil dan dekat dengan CAIC saturated	$M^* = 1761.31$ $S^* = 2756.21$ $I^* = 5575.72$	Baik (Good Fit)
NFI	$NFI \leq 0.90$	0.79	Baik (Good Fit)
NNFI	$NNFI \leq 0.90$	0.82	Baik (Good Fit)
CFI	$CFI \leq 0.90$	0.84	Baik (Good Fit)
IFI	$IFI \leq 0.90$	0.84	Baik (Good Fit)
RFI	$RFI \leq 0.90$	0.76	Baik (Good Fit)
CN	$CN \leq 200$	179.04	Baik (Good Fit)
RMR	Standardized RMR ≥ 0.05	0.060	Baik (Good Fit)
GFI	$GFI \geq 0.90$	0.85	Baik (Good Fit)
AGFI	$AGFI \geq 0.90$	0.82	Baik (Good Fit)
PGFI	$PGFI \geq 0.90$	0.70	Baik (Good Fit)



Gambar 1. Model Struktural

Berdasarkan hasil output model (lihat gambar 1) dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variabel laten eksogen memiliki hubungan pengaruh yang signifikan terhadap variabel laten endogen yang diteliti. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara MS (KSI1), SP (KSI2), KN (KSI3), BP (KSI4), dan KR (KSI5) terhadap HB (ETA1). Hasil pengolahan data menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Berdasarkan nilai koefisien yang ada, diperoleh besaran pengaruh dari masing-masing dan total variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen, sebagai berikut:

- (1) besaran pengaruh MS (KSI1) terhadap HB (ETA1): $(0,42)^2 = 0,1764$ atau 17,64 persen;
- (2) besaran pengaruh SP (KSI2) terhadap HB (ETA1): $(0,09)^2 = 0,0081$ atau 0,81 persen;
- (3) besaran pengaruh KN (KSI3) terhadap HB (ETA1): $(0,23)^2 = 0,0529$ atau 5,29 persen;
- (4) besaran pengaruh BP (KSI4) terhadap HB (ETA1): $(0,11)^2 = 0,0121$ atau 1,21 persen;
- (5) besaran pengaruh KR (KSI5) terhadap HB (ETA1): $(0,13)^2 = 0,0169$ atau 1,69 persen; dan (6) total besaran pengaruh KSI1 + KSI2 + KSI3+ KSI4 + KR (KSI5) terhadap ETA1: $(17,64 + 0,81 + 5,29 + 1,21 + 1,69) = 26,64$ persen.

Setiap indikator dalam penelitian memberikan kontribusi terhadap masing-masing variabel laten eksogen dan endogen. Untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan indikatornya, maka dapat diperiksa nilai koefisien di dalam model. Nilai koefisien suatu muatan faktor atau koefisien yang tinggi merupakan bukti bahwa variabel-variabel terukur atau faktor-faktor mewakili konstruk-konstruk yang mendasarinya. Tabel 5 berikut memperlihatkan hubungan antar variabel laten dengan variabel indikatornya.

Tabel 5. Hasil Uji Hubungan Antar Variabel Laten Eksogen dengan Indikatornya terhadap Variabel Laten Endogen

No	Indikator	Nilai Loading	Koefisien Konstruk	Kontribusi
1	- Aspirasi Pendidikan (X1)	0,61	0,42	0,2562
	- Latarbelakang Sosial-Ekonomi (X2)	0,08	0,42	0,0336
	- Perhatian Orangtua (X3)	0,82	0,42	0,3444
	- Karakteristik Geografis (X4)	0,29	0,42	0,1218
	- Keterlibatan Bekerja (X5)	0,30	0,42	0,1260

No	Indikator	Nilai Loading	Koefisien Konstruk	Kontribusi
2	Bangunan sekolah (X6)	0,54	0,09	0,0486
	- Ruang kelas (X7)	0,46	0,09	0,0414
	- Fasilitas belajar (X8)	0,39	0,09	0,0351
	- Perpustakaan sekolah (X9)	0,51	0,09	0,0459
	- Ruang kantor (X10)	0,58	0,09	0,0522
3	Kelengkapan Jumlah Ketenagaan (X11)	0,50	0,23	0,1150
	- Dedikasi-Integritas Ketenagaan (X12)	0,46	0,23	0,1058
	- Tingkat Kesejahteraan (X13)	0,42	0,23	0,0966
	- Penyediaan Fasilitas (X14)	0,65	0,23	0,1495
4	Besaran Biaya Pendidikan (X15)	0,55	0,11	0,0605
	- Tanggungan Pemerintah (X16)	0,58	0,11	0,0638
	- Sumber Keluarga/Orangtua (X17)	0,15	0,11	0,0165
	- Tawaran Bekerja di Negara Lain (X18)	0,63	0,11	0,1693
5	Pengembangan KTSP (X19)	0,32	0,13	0,0416
	- Pemanfaatan buku paket (X20)	0,64	0,13	0,0832
	- Peningkatan profesi (X21)	0,77	0,13	0,1001
	- Keaktifan KKG/ MGMP (X22)	0,37	0,13	0,0481
	- Sumber pengayaan (X23)	0,89	0,13	0,1157

Dari tabel 5, tampak bahwa variabel laten eksogen Masukan Siswa (KSI1) dipersepsikan memberikan nilai kontribusi terbesar yang mempengaruhi variabel laten endogen Hasil Belajar (ETA1), terutama terkait dengan perhatian/kepedulian dan aspirasi Pendidikan Keluarga/Orangtua. Urutan kedua yang dipersepsikan responden mempengaruhi hasil belajar adalah Ketenagaan (KSI3), antara lain meliputi pentingnya pemberian fasilitas kepada guru untuk menjalankan tugas pembelajaran, kelengkapan jumlah ketenagaan pendidik dan nonpendidik, dedikasi dan integritas tenaga pendidik dan nonpendidik dalam melaksanakan tugas di daerah perbatasan, serta tingkat kesejahteraan. Lebih lanjut, Kurikulum (KSI5) dipersepsikan oleh responden di tempat ketiga, terutama mengacu pada pentingnya upaya guru untuk aktif mencari buku-buku pengayaan dalam melaksanakan tugas pembelajaran, meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan secara terus-menerus, dan memanfaatkan buku pegangan/paket yang diberikan oleh pemerintah.

Variabel laten eksogen Biaya Pendidikan (KSI4) ditempatkan ke dalam urutan keempat yang mempengaruhi hasil belajar. Responden berpandangan bahwa hasil belajar yang diperoleh selama ini teramat kecil

dipengaruhi oleh biaya pendidikan yang dikeluarkan, karena selama ini memang sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Pengeluaran orangtua pun terhadap biaya pendidikan anak, relatif kecil. Di sejumlah tempat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, anak tidak mempersoalkan masalah biaya ini. Menurut sejumlah orangtua yang diwawancarai, apabila mereka kesulitan dalam menjalankan sekolah di dalam negeri, maka akan dicarinya ke sekolah-sekolah di negeri tetangga yang bersedia menerima anak mereka. Dikatakan, sekolah di negeri tetangga bukan hanya gratis, tetapi juga memiliki sarana-prasarana, fasilitas belajar, dan lain-lain yang lebih baik dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Bahkan apabila tiba waktu libur akhir pekan, sekolah menyediakan uang saku dan dana transportasi tersendiri bagi anak Indonesia yang akan pulang ke rumahnya.

Akhirnya variabel latent eksogen sarana-prasarana ditempatkan pada urutan ke lima dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Variabel ini dipersepsikan oleh responden sebagai faktor yang relatif kecil mempengaruhi hasil belajar siswa. Memang keberadaan bangunan sekolah, ruang kelas, fasilitas pendukung belajar, perpustakaan, dan ruang kantor yang memadai, dipandang cukup penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Namun responden melihat faktor lain yang disebut terdahulu dianggap lebih penting untuk diperhatikan dan ditangani serius dalam menghasilkan hasil belajar siswa.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, pada dasarnya kondisi dan situasi penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan masih amat memperhatikan dan dihadapkan dengan berbagai kendala dan keterbatasannya. Upaya menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu di daerah perbatasan, harus lebih memperhatikan persoalan pembangunan pendidikan ini. Penduduk daerah perbatasan, terutama anak sekolah, amat rentan terhadap rangsangan dan pengaruh dari negara tetangga. Hal ini bukan hanya terkait dengan dorongan untuk mengikuti tawaran bersekolah di negara tetangga, tetapi juga kecenderungan tidak melanjutkan pendidikan (*drops out*) dengan mencari pekerjaan di negara tetangga. Pengabaian terhadap persoalan pembangunan pendidikan hanya akan membawa pada pupusnya harapan untuk membentuk dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang bermutu di daerah perbatasan, serta sulit mengharapkan peran dan fungsi daerah perbatasan sebagai garda terdepan untuk mencegah dan menangkal segenap gangguan, rongrongan, dan ancaman dari luar.

Kondisi dan Penerapan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Berbagai fenomena memperkuat sinyalemen, bahwa persoalan Wawasan Kebangsaan di daerah perbatasan cukup memprihatinkan. Segenap tindakan destruktif yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan cara memanfaatkan kelemahan daerah perbatasan, hampir dapat dikatakan tidak pernah tersentuh oleh aparaturnegara. Salah satu penyebab partisipasi sumberdaya manusia di daerah ini amat minim untuk mencegah maupun menangkal berbagai tindakan itu, seperti misalnya dengan cara memberikan pelaporan terhadap pencurian kayu yang diperoleh dari hutan-hutan dan diselundupkan ke luar negeri, penyelundupan barang-barang dari luar secara ilegal ke dalam negeri, kegiatan perdagangan manusia, dan sebagainya. Hal ini tentu jelas berbeda apabila penduduk yang berada di daerah perbatasan dibekali dan memiliki kondisi Wawasan Kebangsaan yang tinggi.

Oleh karena itu, penanaman nilai Wawasan Kebangsaan perlu mendapat perhatian dan penanganan segera. Melalui Wawasan Kebangsaan yang kuat dimiliki oleh penduduk yang berdiam di daerah perbatasan dapat menjadi salah satu pencegah dan penangkal munculnya segenap bentuk tindakan yang membahayakan integritas bangsa dan negara RI. Dalam jangka panjang, salah satu pihak yang perlu mendapat perhatian dalam penanaman nilai Wawasan Kebangsaan itu adalah peserta didik/siswa di daerah. Dalam penelitian ini Wawasan Kebangsaan diartikan sebagai pengenalan, pemahaman, kesadaran, dan sikap terhadap pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadikannya sebagai orientasi dan perwujudan nilai dan tingkah laku sehari-hari. Aspek tersebut merupakan konsensus nasional, sebagai kepribadian dan jatidiri bangsa dan negara Indonesia, yang terdiri dari 4 (empat) pilar yakni: Pancasila, UUD'45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tabel 6 di samping ini dikemukakan persepsi responden terhadap kondisi Wawasan Kebangsaan di daerah perbatasan.

Dari tabel 6 tampak, bahwa untuk segenap komponen yang tercakup dalam konsepsi Wawasan Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD'45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Wawasan Nusantara, memperoleh skor terkategori sedang atau cukup. Kondisi Wawasan Kebangsaan peserta didik/siswa seperti itu amat rentan dan mudah dipengaruhi oleh unsur asing, terutama terkait dengan persoalan ideologi dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu, diperlukan adanya upaya penyebaran dan penanaman Wawasan Kebangsaan terhadap peserta didik/siswa

di daerah perbatasan.

Tabel 6. Persepsi Responden terhadap Kondisi Wawasan Kebangsaan Peserta Didik/Siswa di Daerah Perbatasan

No.	Kabupaten	Rerata				Total
		P.Sila	UUD'45	BT. Ika	NKRI	
1	Natuna, Kep. Riau	2.19	2.85	2.14	2.08	2.32
2	Enambas, Kep. Riau	2.34	2.75	2.74	2.54	2.59
3	Sambas, Prov. Kalbar	2.3	2.56	2.52	2.44	2.46
4	Sintang, Prov. Kalbar	2.75	2.43	2.65	2.74	2.64
5	Bengkayang, Prov. Kalbar	2.65	2.75	2.87	2.63	2.73
6	Kapuas Hulu, Prov. Kalbar	2.93	3.12	3.32	2.85	3.06
7	Nunukan, Prov. Kaltim	3.12	2.87	2.76	2.92	2.92
8	Malinau, Prov. Kaltim	2.52	2.34	2.64	2.83	2.58
9	Atambua, Prov. NTT	2,45	2.57	2.6	2.24	2.47
10	Sangihe, Kep. Talaud	2.66	2.78	2.86	2.85	2.79
11	Kroom, Prov. Papua	2.34	2.56	2.83	2.77	2.63
	Jumlah	2.58	2.69	2.72	2.63	2.65

* Penelitian Daerah Perbatasan, Tahun 2012

Pilar pertama, Pancasila merupakan landasan idealisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kebenaran hakiki dan menjadi cita-cita yang perlu diperjuangkan dan diwujudkan. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya merupakan falsafah bangsa, tetapi juga ideologi negara. Pilar kedua, UUD Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dan sumber hukum tertinggi dalam

kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai landasan konstitusional berupaya mewujudkan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita-cita dan ideologi negara, menata infra dan suprastruktur politik negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk kemakmuran bangsa, mencerdaskan bangsa, membina, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan. Sebagai sumber hukum, segenap peraturan yang ada dalam mengatur dan menata kehidupan bangsa, mulai dari perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah haruslah selara dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam UUD'45.

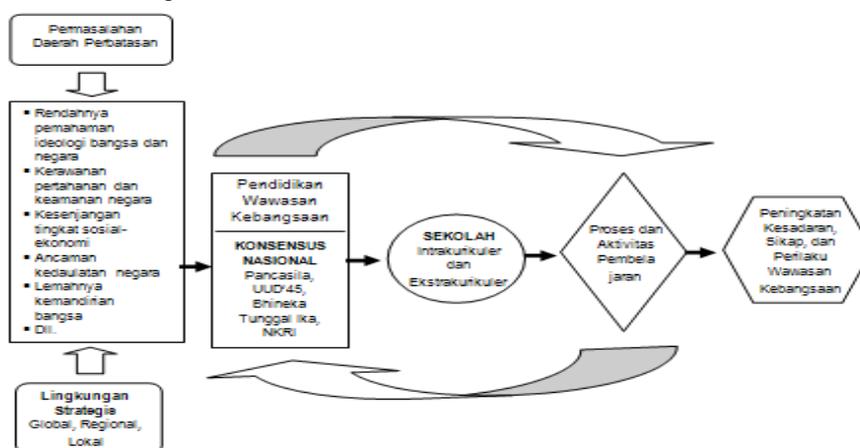
Pilar ketiga, Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan adanya keragaman berbagai aspek kehidupan yang didukung oleh masyarakat Indonesia. Keragaman bermakna kemajemukan (pluralisme) yang sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan, namun tetap dibingkai oleh kesadaran, sikap, dan perilaku yang menjunjung persatuan dan kesatuan sebagai kesatuan bangsa. Keragaman merupakan kodrati yang perlu disyukuri, dan dinilai sebagai kekayaan yang tidak terhingga yang perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Akhirnya pilar keempat: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat. Dalam Pemukaan UUD'45 Alinea ke empat secara tegas disebutkan: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah NKRI.

Ke empat pilar di atas menjadi dasar untuk menanamkan dan meningkatkan kesadaran sikap, dan perilaku Wawasan Kebangsaan peserta didik/siswa di daerah perbatasan. Meski demikian ke empat pilar perlu dijabarkan lebih lanjut, agar dapat digunakan sebagai acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di daerah perbatasan dalam upaya mendidik dan membina peserta didik/siswa mengenai Wawasan Kebangsaan ini. Melalui pendidikan Wawasan Kebangsaan diharapkan dapat menimbulkan pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku peserta didik/siswa di daerah perbatasan untuk mencegah, menjaga, mempertahankan, dan mengatasi segenap

gangguan, rongrongan, ancaman dari luar maupun dari dalam yang membahayakan eksistensi, kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Dalam bagan 4 diperlihatkan, bahwa pendidikan Wawasan Kebangsaan perlu didesain secara cermat dan matang yang melibatkan 4 (empat) pilar konsensus nasional. Upaya penanaman Wawasan Kebangsaan pada hakekatnya adalah penyebaran nilai, di mana dengan nilai-nilai itu diharapkan dapat menjadi kesadaran diri dan digunakan sebagai orientasi perwujudan sikap dan perilaku sehari-hari. Pendidikan Wawasan Kebangsaan terhadap peserta didik/siswa di sekolah-sekolah di daerah perbatasan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai konsensus nasional ke dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler dalam arti mengintegrasikan substansi/materi Wawasan Kebangsaan ke dalam sub-

stansi/materi segenap mata pelajaran yang diajarkan. Dalam konteks ini, pendidikan Wawasan Kebangsaan bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggungjawab guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggungjawab seluruh guru untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan. Terlebih lagi pelajaran PKn, menurut Malik Fajar (2004), masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan, antara lain berupa: (1) masukan instrumental (instrumental input) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*instrumental input*), terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian kerap kali pelaksanaan pembelajaran PKN tidak mengarah pada misi seharusnya.



Gambar 2. Alur Pikir Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah Perbatasan

Sama halnya dengan intrakurikuler, penerapan pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselengga-

rakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan diri, sosial, rekreatif dan persiapan karir siswa melalui prinsip: individual, pilihan, keterlibatan aktif, menyenangkan, etos kerja, dan kemanfaatan sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian ini dihasilkan, bahwa pada dasarnya kondisi pendidikan di daerah perbatasan cenderung memperhatikan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak yang berkompeten. Upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan peningkatan segenap aspek pendidikan di dalamnya. Sejumlah variabel latent eksogen dalam penelitian ini, seperti Masukan Siswa (MS), Sarana Prasarana (SP), Ketenagaan (KN), Biaya Pen-

didikan (BP), dan Kurikulum Pendidikan (KR), terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel latent endogen Hasil Belajar (HB).

Variabel latent eksogen Masukan Siswa (MS), terutama berupa kepedulian dan aspirasi pendidikan keluarga/orang tua memberikan nilai kontribusi tertinggi terhadap variabel latent endogen Hasil Belajar, kemudian disusul dengan variabel latent eksogen Ketenagaan, Kurikulum Pendidikan, Biaya Pendidikan, dan Sarana-Prasarana Pendidikan. Hasil tersebut menunjukkan, bahwa responden mempersepsikan

pentingnya faktor ketenagaan pendidik dan nonpendidik yang memadai guna mencapai hasil belajar peserta didik/siswa, antara lain meliputi dedikasi dan integritas yang tinggi dari tenaga pendidik dan nonpendidik yang bertugas di daerah perbatasan, jumlah tenaga pendidik dan nonpendidik (guru) dan TU/Administrasi) yang relatif lengkap, dan latarbelakang pendidikan guru yang memadai pula. Kurikulum pendidikan dipersepsikan di tempat kedua memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa, terutama mengacu pada pentingnya upaya guru untuk aktif mencari buku-buku pengayaan belajar, meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mengajar secara terus-menerus, dan pemanfaatan buku pegangan yang diberikan oleh pemerintah, dan seterusnya.

Meski demikian, pada dasarnya kondisi dan situasi penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan keterbatasannya. Dengan kondisi sedemikian rupa, sulit kiranya untuk membentuk dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan yang memadai. Pengabaian terhadap persoalan pembangunan pendidikan hanya akan membawa pada pupusnya harapan untuk membentuk dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan. Peran dan fungsi daerah perbatasan sebagai garda terdepan yang mampu mencegah dan menangkal segenap gangguan, rongrongan, dan ancaman dari luar, tidak akan terwujud.

Sejalan dengan yang disebut terakhir itu, upaya pembangunan pendidikan di daerah perbatasan pun perlu diimbangi dengan pembentukan dan pengembangan Wawasan Kebangsaan penduduk di wilayah ini, terutama terhadap anak usia sekolah. Upaya pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi peserta didik/siswa di daerah perbatasan merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kondisi Wawasan Kebangsaan peserta didik berada pada kategori yang kurang memuaskan, dan diprediksi rentan terpengaruh oleh unsur asing. Rangsangan eksternal relatif mudah mempengaruhi kehidupan peserta didik/siswa daerah perbatasan, baik yang bersifat ideologis, politis, ekonomis, sosial-budaya, maupun pertahanan-keamanan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah hal disarankan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan maupun penanaman Wawasan Kebangsaan peserta didik/siswa di daerah perbatasan.

Pertama, diperlukan upaya untuk meningkatkan segenap aspek pendidikan di daerah perbatasan, baik terkait dengan pembangunan gedung sekolah,

penyediaan fasilitas belajar, pemenuhan buku pelajaran, dan lain sejenisnya. Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten) perlu mengalokasikan anggaran tertentu untuk membangun (baca: menyediakan) tempat tinggal (mess/rumah dinas) untuk tenaga pendidik dan nonpendidik. Dengan penyediaan tempat tinggal yang memadai dan layak huni diharapkan tenaga pendidik/nonpendidik di daerah perbatasan dapat lebih berkonsentrasi dan hadir setiap hari guna menjalankan tugas/pekerjaannya di daerah perbatasan. *Kedua*, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan, dan keterampilan mengajar guru oleh pihak tertentu dari LPMP-Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten, Perguruan Tinggi, dan sebagainya dengan cara mendekati/datang ke daerah perbatasan secara rutin maupun berkala. *Ketiga*, terkait dengan penanaman nilai Wawasan Kebangsaan, diperlukan adanya tindakan melakukan revitalisasi terhadap peran pemerintah daerah, Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas untuk bertindak sebagai agen atau mediator pendidikan Wawasan Kebangsaan di dalam pelaksanaan tugas mereka.

(a) Peningkatan Peran Pemerintah Daerah,

Penanaman nilai Wawasan Kebangsaan bagi peserta didik/siswa di daerah perbatasan memerlukan peningkatan peran pemerintah daerah, antara lain dengan cara mengembangkan Rencana Aksi Daerah yang di dalamnya terdiri dari berbagai pihak terkait untuk menyusun dan menjalankan pendidikan Wawasan Kebangsaan. Daerah perlu membentuk Tim/Kelompok Kerja tertentu yang bertugas mengembangkan pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah perbatasan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti: pakar dari perguruan tinggi, praktisi, peneliti, perekayasa, dan lain-lainnya. Peningkatan peran daerah ini paling tidak berfungsi ganda, pertama sebagai wadah pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah perbatasan, dan kedua upaya mengangkat dan mengembangkan nilai lokal yang relevan dengan pembentukan Wawasan Kebangsaan.

(b) Peningkatan Peran Guru

Pelajaran PKn memiliki peranan yang amat penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam kaitan itu, guru PKn sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran dituntut untuk menguasai kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran PKn. Upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan mutu guru PKn masih perlu dilakukan secara sistematis agar terjadi kesinambungan antara pendidikan guru melalui LPTK, pelatihan dalam jabatan,

serta pembinaan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan.

Perlu disadari, bahwa pendidikan Wawasan Kebangsaan bukan merupakan urusan dan tugas guru PKn saja, tetapi serentak melibatkan segenap guru yang ada. Hal ini menyiratkan, bahwa upaya membentuk, membangun akhlak dan karakter bangsa juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban segenap guru di sekolah. Untuk itu pembangunan karakter bangsa sangat membutuhkan peningkatan peran guru, terutama dalam hal penguasaan, kemampuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang menjadi tugas pokoknya. Seiring dengan itu diperlukan upaya penyesuaian terhadap peraturan dalam Permendiknas No. 16/2007 agar pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat tercakup sebagai salah satu komponen/unsur dalam kompetensi yang perlu dimiliki guru.

(c) Peningkatan Peran Kepala Sekolah

Diperlukan revitalisasi peran Kepala Sekolah guna mendukung pembentukan karakter bangsa dan penanaman Wawasan Kebangsaan peserta didik, khususnya di daerah perbatasan. Tuntutan yang ada agar Kepala Sekolah dapat menjalankan dan mencerminkan peran dan perilaku yang didasarkan atas akhlak mulia, jujur, berbudi luhur, sopan santun, mampu menahan emosi, mampu mengendalikan diri, mendukung kesetaraan, menghargai sesama manusia, dan lain-lainnya, yang dapat menjadi contoh, panutan, dan tauladan bagi warga sekolah untuk menirunya. Kepala Sekolah hendaknya mampu mengintegrasikan segenap nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan ke dalam peran dan perilaku yang diembannya itu. Dalam kaitan dengan peningkatan peran Kepala Sekolah itu mensyaratkan, bahwa diperlukan penyesuaian terhadap Permendiknas No. 13/2007 mengenai kompetensi Kepala Sekolah, agar dapat memasukkan pula kompetensi Kepala Sekolah terkait dengan peran dan tugas sebagai pendidik Wawasan Kebangsaan. Artinya, dalam peraturan tersebut perlu mencakup penguasaan, kemampuan, dan keterampi-

lan Wawasan Kebangsaan sebagai satu dimensi kompetensi Kepala Sekolah.

(d) Peningkatan Peran Pengawas

Salah satu pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan adalah Pengawas, sebagai unsur tenaga kependidikan yang memiliki tugas pokok memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif maupun akademik. Dalam kaitan dengan upaya membentuk Wawasan Kebangsaan, terutama terhadap peserta didik di daerah perbatasan yang menjadi fokus perhatian penelitian ini, Pengawas masih belum menjalankan peran sebagai pihak yang memberikan pengawasan dan penilaian yang berhubungan dengan upaya penyebaran dan penanaman nilai Wawasan Kebangsaan di sekolah.

Dalam persyaratan kompetensi mengenai standar kualifikasi dan kompetensi pun tidak secara tegas mengemukakan adanya kompetensi yang terkait dengan pendidikan karakter bangsa sebagai salah satu peran dan tugas yang perlu dijalankan oleh Pengawas. Oleh karena itu peningkatan peran dan tugas Pengawas dalam pendidikan Wawasan Kebangsaan terhadap peserta didik/siswa di segenap satuan pendidikan merupakan hal yang penting untuk diwujudkan. Peran Pengawas tidak lagi hanya mengacu pada tugas mengawasi dan mengevaluasi hal-hal yang bersifat administratif sekolah maupun pelaksanaan tugas guru terkait dengan mata pelajaran yang diampunya, tetapi juga kemampuan Kepala Sekolah dan Guru sebagai agen atau mediator pendidikan Wawasan Kebangsaan. Seiring dengan itu, diperlukan penyesuaian peraturan yang berhubungan dengan kompetensi Pengawas (Permendiknas No. 12/2007) untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pendidikan Wawasan Kebangsaan di sekolah. Re-evaluasi terhadap peraturan yang ada kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung peran Pengawas terhadap upaya pembangunan karakter bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M (2004), "Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Nation and Character Bulding", Semiloka Nasional tentang Revitalisasi Nasionalisme Indonesia Menuju Character and Nation Building.
- Kusnendi, M.S, 2008, Model-Model Persamaan Struktural, Bandung: Alfabeta.
- Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Minimal Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pengawas.
- Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Minimal Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Kepala Sekolah.
- Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Minimal Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik/Guru.